

TESIS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DEWAN KOMISARIS ATAS PERBUATAN
YANG DILAKUKAN ATAS DASAR SURAT KUASA
DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS**

OLEH :

PRIMATA PRISCHA ARTIKA

1720123039

Dosen Pembimbing :

Dr. BUSYRA AZHERI, S.H.,M.H.

Pembimbing I

Dr. YUSSY A. MANNAS, S.H., M.H

Pembimbing II



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

MAGISTER KENOTARIATAN

2019

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DEWAN KOMISARIS
ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKANNYA
ATAS DASAR SURAT KUASA DIREKSI
PADA PERSEROAN TERBATAS**

(Primata Prisca Artika, 1720123039, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang, 102 hlm)

ABSTRAK

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang pendiriannya wajib didirikan oleh 2 (dua) orang, dengan akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris yang kemudian diajukan proses status badan hukumnya kepada Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dilakukan dengan pendaftaran secara online yaitu dikenal juga dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan mendapat status badan hukum. Maka Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing, Dewan Direksi adalah pengurus yang berwenang mengurus Perseroan Terbatas sedangkan Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi, dan apabila Dewan Direksi berhalangan Direksi berwenang menunjuk orang lain dengan surat kuasa untuk menjalankan tugas-tugasnya selaku Direksi, apabila kuasa tersebut diberikan oleh Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris maka hal ini dapat terjadi konflik interest terhadap Dewan Komisaris yang tugas dan wewenangnya termasuk tanggung jawabnya mengawasi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi. Untuk itu penulis tertarik membahas Bagaimana akibat hukum dari surat kuasa yang diberikan direktur kepada komisaris atas nama perseroan pada perseroan terbatas? Bagaimana pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh dewan komisaris apabila terjadi persoalan di kemudian hari pada perseroan terbatas? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan secara normatif dengan melihat kepada prinsip-prinsip perseroan terbatas yang tertuang dalam undang-undang perseroan terbatas. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa direksi tidak dapat memberikan kuasa kepada komisaris, karena komisaris tidak memenuhi kriteria sebagai karyawan perseroan. Oleh karena itu pemberian kuasa direksi kepada komisaris tidak menimbulkan akibat hukum karena komisaris tidak berwenang sebagai penerima kuasa direksi. Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pemberian kuasa komisaris adalah batal demi hukum.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Surat Kuasa, Tanggung Jawab

The Legal Responsibility of the Board of Commissioners for Their Actions Based on The Power of Attorney of the Board of Directors of a Limited Liability Company

(Primata Prisca Artika, BP Number: 1720123039, Master Program of Notary, Faculty of law, Andalas University, Number of Page: 105)

ABSTRACT

Limited Liability Company is a legal entity which is a capital alliance, established based on an agreement, conducts business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and fulfills the requirements stipulated in this Law and its implementing regulations. As stated in Article 1 number 1 of Law Number 40 of 2007, the establishment of which must be established by 2 (two) people, with a deed of incorporation made with a notarial deed which is then submitted to the legal entity status process to the Ministry of Human Rights Law of the Republic of Indonesia, which is done by registering online which is also known as the Legal Entity Administration System (SABH). Limited Liability Companies that have been approved by the Ministry of Human Rights Law of the Republic of Indonesia will receive legal entity status. Then the Board of Directors and the Board of Commissioners have the respective duties and responsibilities, the Board of Directors is the management authorized to take care of a Limited Liability Company while the Board of Commissioners has the authority to supervise the Board of Directors, and if the Board of Directors is unable to have the Board of Directors authorized to appoint another person with a power of attorney to carry out his duties as the Board of Directors, if the power of attorney is given by the Board of Directors to the Board of Commissioners, this may lead to an internal conflict with the Board of Commissioners whose duties and authorities include oversight of the duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors. For this reason, the writer is interested in discussing the legal consequences of the power of attorney given by the director to the commissioner on behalf of the company in limited liability companies. What is the legal liability of the board of commissioners if there is a problem in the future with a limited liability company? This research is a normative legal research using a normative approach by looking at the principles of a limited liability company contained in a limited liability company law. Sources and types of data used are primary data and secondary data, which will then be analyzed using qualitative analysis. Based on the results of the study note that directors can not give power to the commissioner, because the commissioner does not meet the criteria as a company employee. Therefore, the granting of directors' powers to the commissioners does not cause legal consequences because the commissioners are not authorized as recipients of the directors' powers. It can be concluded that the legal consequences of granting power of attorney are null and void.

Keywords: Limited Liability Company; Power of Attorney; Responsibility